**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

**PROVINSI JAWA BARAT**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. POPPY SOPHIA BAKUR, M.EP

Jabatan : Kepala Biro Produksi dan Industri

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AHMAD HERYAWAN

Jabatan : GUBERNUR

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, ............... 2017

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU,

AHMAD HERYAWAN Ir. POPPY SOPHIA BAKUR, M.EP

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017**

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terwujudnya Akuntabilitas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat serta Pelayanan Informasi Publik | Terpetakannya arah dan orientasi media massa serta tersedianya analisa pemberitaan media Tersebarnya informasi kebijakan program dan kegiatan pemerintah Terjalinnya hubungan antar lembaga Terdokumentasikannya peliputan kegiatan Pemerintah Prov. Jawa Barat Tersebarnya informasi kebijakan program dan kegiatan pemerintah Terwujudnya tata kelola pengaduan masyarakat Tersedianya skala prioritas isu yang harus disampaikan kepada publik Terkumpulnya dan terkelolanya data dan informasi yang sudah terverifikasi Terjalinnya hubungan antar lembaga Tersebarnya informasi kebijakan program dan kegiatan pemerintah Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja OPD/Balai/UPT/UOTD/UPTB dalam mendukung tugas dan fungsinya Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/ UPTB | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Publikasi dan Pemberitaan Kebijakan Pembangunan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel agar Dapat Diterima oleh Lingkungan Masyarakat Jawa Barat; | Tersebarnya informasi kebijakan program dan kegiatan pemerintah Terdokumentasikannya peliputan kegiatan Pemerintah Prov. Jawa Barat Tersedianya skala prioritas isu yang harus disampaikan kepada publik Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja OPD/Balai/UPT/UPTD/ UPTB dalam mendukung tugas dan fungsinya | 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 3 | Terwujudnya Koordinasi yang Efektif dalam Perencanaan dan Pengelolaan Kegiatan Internal, serta Terwujudnya Dukungan yang Optimal dalam rangka Kelancaran Kinerja. | Tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntabel | 0.00 |
| 4 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keprotokolan dalam Menunjang Tugas Pimpinan Daerah dan Tamu | Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja OPD/Balai/UPT/UOTD/UPTB dalam mendukung tugas dan fungsinya | 0.00 |
| 5 | Terkoordinasinya dan terfasilitasinya kegiatan-kegiatan pimpinan; | Persentase kegiatan-kegiatan pimpinan yang terkoordinasi dan terfasilitasi; | 0.00 |
| 6 | Terwujudnya prosedur pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang lebih baik; | Persentase pengelolaan administrasi ketatausahaan dan kearsipan yang sesuai dengan prosedur | 0.00 |
| 7 | Terwujudnya prosedur pengelolaan administrasi keuangan yang baik dan untuk evaluasi dan perencanaan SKPD; | Persentase pengelolaan administrasi keuangan dan perencanaan SKPD yang cepat, tertib dan akuntabel dan tepat waktu | 0.00 |
| 8 | Meningkatnya Manajemen dan kebijakan pengelolaan barang dan aset daerah. | Persentase Pengelolaan Barang dan aset daerah yang sesuai dengan kebijakan | 0.00 |
| 9 | Tersedianya bahan kebijakan umum yang akurat bagi pembangunan aspek pertanian, ketahanan pangan peternakan, kelautan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan, industri, perdagangan, dan Pariwisata | Jumlah Perumusan Kebijakan yang ditindaklanjuti | 0.00 dokumen |
| 10 | Terintegrasinya program pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat dan stake holder; |  |  |
| 11 | Tersedianya data dan informasi serta hasil evaluasi dari lapangan terkait aspek pertanian, ketahanan pangan peternakan, kelautan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan, industri, perdagangan, dan Pariwisata |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | | **Anggaran** | | **Keterangan** |

Bandung, ............... 2017

GUBERNUR, Kepala Biro Produksi dan Industri,

AHMAD HERYAWAN Ir. POPPY SOPHIA BAKUR, M.EP